



Aset 661 M Minsel Tak Jelas

Editor: **Idham Malewa**
Peliput: **Risky Pogaga/
Citra Soputan**

MANADO— Pantas, bila tekad Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Christiany Tetty Paruntu sulit meraih predikat Wajar Dalam Pengecualian (WDP) tahun ini. Pasalnya, ada puluhan miliar penggunaan dana termasuk Rp661,06 miliar aset yang

sulit dipertanggungjawabkan. Berdasarkan opini di LHP 2011 yang dibebankan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada 9 item, termasuk aset di neraca keuangan 2011 tak bisa diyakini kebenarannya.

“Seperti pencatatan aset seharusnya berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dapat diyakini dengan memiliki surat/

Baca Aset... Hal: 11

Penyebab

DISCLAIMER

Pemkab Minsel:

1. **PAD** belum dilaporkan, disetorkan dan sulit diuji kewajarannya: Rp2.945.371.436.
2. **Realisasi** belanja barang dan jasa yang bermasalah: Rp6.565.433.220.
3. **Realisasi** bansos tidak didukung bukti lengkap minimal: Rp2.518.850.000.
4. **Saldo** kas tekor bawaan dari pajak yang tak disetor 2010: Rp724.500.000.
5. **Saldo** piutang penjualan barang milik daerah berupa kendaraan dinas: Rp479.071.825 yang tak sesuai ketentuan karena tidak melalui prosedur lelang.
6. **Investasi** jangka panjang: Rp1.183.800.000 di Bank Sulut belum ditetapkan lewat Perda. Selain itu, Pemkab Minsel belum mengakui penyertaan modal di PDAM Minsel minimal: Rp6.427.387.765.
7. **Ketidaktertiban** pencatatan aset tetap sehingga saldo dalam neraca 31 Desember 2011: Rp661.062.979.684 tidak dapat diyakini.
8. **Ketidaktertiban** penyetoran pajak pihak ketiga yang disetor tidak tepat waktu tahun 2010 dan 2011 berakibat selisih antara saldo pajak pihak ketiga dalam laporan keuangan: Rp21.646.926.949 dengan saldo pajak pihak ketiga oleh bendahara umum daerah (BUD): Rp17.724.678.205.
9. **Nilai** saldo utang jangka pendek lainnya sebesar Rp43.821.075.145 tidak dapat diyakini.

Sumber: BPK RI Perwakilan Sulut



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA

Sub Bagian Hukum dan Humas

Aset...

Sumbangan Dari Hal: 1

dokumen yang lengkap, tapi sesuai saldo neraca yang ada tak mampu dipertanggungjawabkan," tandas Kasubag Hukum dan Humas BPK RI Perwakilan Sulut Made Dharma MM, Rabu (8/8) kemarin.

Pemkab juga diduga melakukan pencatatan tanpa didukung bukti otentik. Penggunaan anggaran ini sulit dipertanggungjawabkan. Seperti realisasi belanja barang dan jasa yang bermasalah senilai Rp6,56 miliar dan realisasi Bansos tidak didukung bukti lengkap minimal Rp2.51 miliar. (selengkap baca grafis) "Dalam pemeriksaan tim dari BPK di Pemkab Minsel, ada sedikitnya 9 item anggaran yang bermasalah dan itu menyebabkan opini disclaimer," beber Made Dharma.

Kepada Koran ini, Made menjelaskan, Pemkab Minsel masih sulit keluar dari opini terendah, setelah tidak wajar, wajar dengan pengecualian dan wajar tanpa syarat. Contoh yang lain, item perjalanan dinas di sekretariat daerah, sekretariat dewan dan SKPD tidak

mampu dipertanggungjawabkan secara sah dan lengkap, sehingga ini menjadi temuan yang cukup besar. "Paling dominan temuan ini didapat tim pemeriksa BPK di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)," beber Made.

Made pun menegaskan, jika terjadi penyimpangan yang merugikan negara, BPK tidak bisa melakukan penyidikan atau melapor. Tugas Pemkab hanya memberikan opini penggunaan anggaran negara, selanjutnya ini bisa saja menjadi 'pintu masuk' bagi aparat penegak hukum. "Silakan kalau ada temuan

Akibat sejumlah temuan itu, Pemkab Minsel harus mampu menyelesaikan dan memberikan laporan pertanggungjawaban secara transparan, sehingga itu bisa menjadi bahan pertimbangan.

Sementara itu, Pemkab Minsel belum bersedia menanggapi panjang lebar. Sekkab Minsel Drs MC Kairupan selaku kuasa pengguna anggaran saat dikonfirmasi enggan bicara lebih. "Untuk sementara belum bisa beri tanggapan karena kami belum mengambil LHP tersebut.

Kita menunggu undangan dari BPK dulu. Resminya bupati yang mengambil dan kepala daerah yang menyampaikan hasil dan opininya," ujar Kairupan sembari mengaku belum tahu dengan hasil opini 2011.

Namun kata Kairupan, jika LHP BPK Minsel benar-benar disclaimer pihaknya akan terus berbenah. "Kalau memang begitu, mungkin itu resiko yang harus diterima. Yang jelas pihak kami telah melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keuangan dan yang pasti, kali ini lebih baik dari sebelumnya," pungkasnya sembari mengaku masalah hutang merupakan pengaruh utama dari perolehan tersebut.

Wakil Ketua DPRD John Sumual pada Koran ini mengungkapkan keprihatinannya pada hasil ini. Menurut Sumual, Bupati CE Paruntu harus mengevaluasi kinerja, termasuk para SKPD.

"Dengan adanya opini disclaimer, sudah saatnya Bupati mengevaluasi kinerja SKPD termasuk di dalamnya Sekkab selaku kuasa pengguna anggaran," ujar Sumual.*